

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

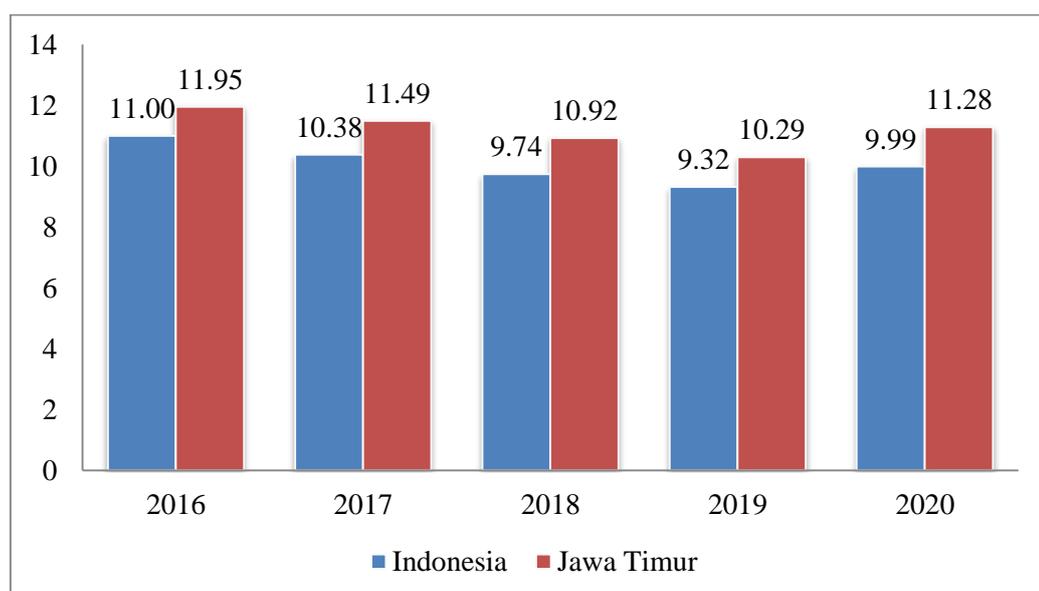
Kesejahteraan sosial adalah tujuan dan aspirasi banyak negara di dunia. Demikian pula Indonesia memiliki tujuan pembangunan nasional yaitu membangun masyarakat yang berdaya saing, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan pembangunan nasional Indonesia saat ini fokus pada penguatan pemberdayaan manusia melalui pembangunan ekonomi (Islami & Anis, 2019). Menurut Todaro & Stephen C (2014) tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk memperluas perekonomian, yang harus selaras dengan peningkatan kualitas masyarakat, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pengurangan pengangguran. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan ekonomi yang harus diatasi.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam proses pembangunan nasional Indonesia dan tidak boleh dianggap remeh. Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Menurut Sajogyo (1997) garis kemiskinan dibagi menjadi enam kategori yaitu hidup layak, hidup cukup, hampir miskin, miskin, sangat miskin, dan termiskin, yang masing-masing ditentukan oleh jumlah beras yang dikonsumsi per tahun sebanyak > 960 kg untuk hidup layak, 481-960 kg untuk hidup cukup, 321-480 kg untuk hampir miskin, 241-320 kg untuk

miskin, 181-240 kg untuk sangat miskin, dan 180 kg untuk termiskin. Kemiskinan menjadi masalah utama sepanjang sejarah Indonesia, karena upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan belum dilaksanakan secara optimal dan banyak program yang belum tepat sasaran. Selain itu, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat adalah tujuan akhir negara.

Grafik kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berbanding lurus dengan Indonesia. Namun kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih melebihi angka kemiskinan di Indonesia, hal tersebut tentu menjadi sebuah permasalahan mengingat Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data BPS Indonesia (2021) rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur dinyatakan berada di urutan ke-15 dari 34 provinsi di Indonesia. Perkembangan kemiskinan di Indonesia dan Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

**Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Indonesia, 2021

Pada gambar 1.1 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan sebesar 11,95% dan turun menjadi 11,49% pada tahun 2017, kemudian turun kembali menjadi 10,92% di tahun 2018 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 10,29% kemudian mengalami peningkatan 11,28% pada tahun 2020.

Akan tetapi keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur merupakan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (BPS Indonesia, 2021). Hal ini menunjukkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di semua kelas sosial dimana pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh sekelompok kecil masyarakat.

**Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2016-2020**

Nama Wilayah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
DI Yogyakarta	13,22	12,69	11,97	11,57	12,54
Jawa Tengah	13,23	12,62	11,25	10,69	11,62
Jawa Timur	11,95	11,49	10,92	10,29	11,28
Jawa Barat	8,86	8,27	7,35	6,86	8,15
Banten	5,39	5,52	5,24	5,01	6,27
DKI Jakarta	3,75	3,77	3,56	3,45	4,61

Sumber: BPS Indonesia, 2021

Peningkatan kemiskinan di Jawa Timur disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar, namun tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan

kesempatan kerja (BPS Jawa Timur, 2021). Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Jawa Timur yang besar dapat menjadikannya masalah utama dalam kemiskinan, dikarenakan semakin besar jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk maka semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi daerah tersebut, baik dari segi sarana dan prasarana.

Selama ini mayoritas penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut data sensus BPS 2020, sebanyak 56,10% dari total penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dimana 26,11% tinggal di Jawa Timur. Lonjakan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dipicu oleh program Keluarga Berencana (KB) yang belum terealisasi yang menyebabkan tanggung jawab keluarga meningkat. Kenaikan harga bahan pokok akibat kelangkaan sembako dan adanya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Jawa Timur. Akibatnya terjadi ketimpangan distribusi kesenjangan pembangunan dan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Pendapatan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Pendapatan digambarkan melalui upah minimum provinsi, rendahnya upah minimum provinsi akan memberikan dampak pada rendahnya kesejahteraan pekerja atau masyarakat. Kesejahteraan pekerja yang rendah akan berakibat pada meningkatnya jumlah kemiskinan. Dengan adanya standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja dapat meningkat. Upah minimum provinsi pada dasarnya

digunakan sebagai jaring pengaman atau *safety net* bagi tenaga pekerja yang ada di Indonesia (Naluria Utami, 2019).

Selain Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menjadi faktor kemiskinan, pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga merupakan permasalahan mendasar kemiskinan. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada masyarakat. Hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata akan menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan. Dalam mengurangi jumlah kemiskinan, semua negara mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Meningkatnya kemakmuran suatu masyarakat dapat dilihat melalui tingkat pendapatan, pendapatan masyarakat akan mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud. Menurut Sukirno (2016) jika tingkat pengangguran tinggi, hal ini dapat mengurangi pendapatan dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai masyarakat. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran, menurut Maipita (2013) apabila seseorang individu atau masyarakat memiliki pekerjaan maka kesejahteraannya akan terpenuhi karena mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan upah yang mereka miliki. Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat telah memperburuk masalah pengangguran di suatu daerah (Nurhayati & Kusumastuti, 2020). Tingkat

pengangguran mencerminkan kurangnya keberhasilan dalam pembangunan negara. Kurangnya pemerataan penduduk serta perhatian khusus pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab tingginya pengangguran.

BPS Jawa Timur (2021) menyatakan bahwa kemiskinan di Jawa Timur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, hasil pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Dalam upaya penanggulangannya, pemerintah Provinsi Jawa Timur berfokus pada pemerataan penduduk, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan perkotaan. Tujuannya untuk mengisi kesenjangan yang masih besar antara daerah pedesaan dan perkotaan di Jawa Timur. Hal ini tercermin dari pernikahan dini, putus sekolah, dan tingginya angka kematian ibu dan bayi (BPS Jawa Timur, 2021). Sedangkan dalam strateginya pemerintah Jawa Timur mempunyai 4 sasaran yang harus dicapai, antara lain: 1) menurunkan angka kemiskinan Jawa Timur di bawah tingkat nasional; 2) menurunkan jumlah penduduk miskin berada di peringkat kedua nasional; 3) menurunkan indeks kedalaman; dan 4) menurunkan indeks keparahan kemiskinan Jawa Timur. Penurunan kemiskinan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan pada tahun 2030.

Lebih lanjut berbagai penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, termasuk salah satunya tentang pengaruh UMP terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh (Ihsan & Ikhsan, 2018), (Islami &

Anis, 2019), (Nurhayati & Kusumastuti, 2020) menjelaskan bahwa UMP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Masjkuri, 2018), (Sholihin & Wiwoho, 2020) menjelaskan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh (Safuridar, 2017), (Saputra et al., 2019) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari, 2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ketiga penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadila & Marwan, 2020), (Nainggolan, 2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Dan yang terakhir penelitian tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh (Bintang & Woyanti, 2018), (Ariasih & Yuliarini, 2021) menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2021) menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ketiga penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardian et al., 2021), (Shaleh et al., 2021) menjelaskan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Dari berbagai uraian diatas terlihat bahwa fenomena penurunan kemiskinan di Jawa Timur masih cukup tinggi dibandingkan dengan 34 provinsi di Indonesia dan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Sebaliknya pandemi Covid-19 telah menaikkan

angka kemiskinan dan menjadikan fokus upaya pemerintah mengatasi kemiskinan tidak tepat sasaran. Selain itu, kemiskinan tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja yang luas. Dampak kemiskinan sendiri terhadap perekonomian sangat merugikan, didukung dengan hasil temuan penelitian yang beragam dan terdapat ketidak-konsistenan hasil penelitian mengenai UMP, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan. Adanya kesenjangan dalam uraian penelitian diatas diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan yang diambil tanpa melalui penelitian mendalam, dikhawatirkan tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Maka pada kesempatan ini peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari berbagai konsep uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat berbagai pertanyaan, maka dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

1. Penelitian ini mencakup data *time series* di Provinsi Jawa Timur
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dimana tingkat kemiskinan adalah variabel dependen. Sedangkan variabel independen adalah upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat, dan berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Bagi pihak pengambil kebijakan, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengambil kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Serta diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sebagai referensi dalam penelitian sejenis di masa mendatang.